

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum Akta Notaris dalam penguatan legalitas berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilihat dalam perspektif Permendes No 4 Tahun 2015 (Studi di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Semarang), 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusi penyusunan Akta Notaris dalam berdirinya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa : 1) BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan musyawarah bersama. Selain Peraturan Desa sebagai legitimasi berdirinya BUMDes, kenyataan di lapangan ada beberapa BUMDes di Kabupaten Semarang yang telah mencantumkan Akta Notaris dalam penguatan legalitas berdirinya. Akta Notaris sebagai penguat legalitas berdirinya BUMDes mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum di kemudian hari, 2) kelemahan-kelemahan penyusunan Akta Notaris dalam berdirinya BUMDes berdasarkan penelitian adalah : 1. Setiap BUMDes akan mempunyai format AD/ART yang berbeda dan tentunya tidak sama dengan format baku dari Notaris. 2. Referensi yang sangat minim mengenai pembuatan Akta Pendirian BUMDes. Karena di dalam Permendes No 4 Tahun 2015 hanya ditegaskan bahwa setiap Desa dapat membentuk BUMDes berdasarkan Peraturan Desa. Pencatatan pendirian BUMDes ke dalam Akta Notaris adalah inisiatif dari pengurus BUMDes itu sendiri. Solusi dari kelemahan tersebut adalah pengetahuan serta pengalaman notaris terkait pembuatan akta BUMDes. Terkait dengan solusi yang telah disebutkan selain pentingnya pengetahuan dan pengalaman seorang Notaris dalam membuat suatu Akta, tetapi juga Notaris perlu memberikan penjelasan hukum, atas akta yang dibuat karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang "*Esterioik*" yang artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, karena dalam hal tugasnya diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Akta Notaris, Kekuatan Hukum

Abstract

This study aims to: 1) Study and analyze the legal force of notarial deed in strengthening the legality of Village-Owned Enterprises viewed from the perspective of Pemendesa No. 4 of 2015 (A Study in the Village-Owned Enterprises of Semarang Regency), 2) Study and analyze the weaknesses and solutions of the making of Notarial Deed in Village-Owned Enterprises establishment in Semarang Regency.

The approach method used in this study was sociological juridical, a method to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in real life system. The specification of this study was analytical descriptive that tried to describe legal issues, legal system and study or analyze them based on the needs of related study.

Based on the results of data analysis it can be concluded that: 1) Village-Owned Enterprises (BUMDes) was established based on the Village Law and Village Consultative Body through a consultative way. Besides the Village Law as a legitimation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) establishment, in the reality of the field it was found that there were Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Semarang Regency that have attached the Notarial Deeds in strengthening their legality. The Notarial Deeds as a legality strengthening of Village-Owned Enterprises (BUMDes) establishment had constant legal force and could give legal certainty and legal protection in the future, 2) the weaknesses of the making of Notarial Deeds in Village-Owned Enterprises (BUMDes) establishment based on this study were: 1. Each Village-Owned Enterprises (BUMDes) would have different AD/ART format from the Notary Public's standard format. 2. Minimum references on the making of Notarial Deed of Village-Owned Enterprises (BUMDes). In Permendesa No. 4 2015 it only stated that each Village would establish Village-Owned Enterprises (BUMDes) based on the initiative by the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) itself. The solution of the weaknesses is the knowledge and experience of related Notary Public on the making of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Notarial Deed. Related to the solution mentioned other that the importance of knowledge and experiences of a Notary Public in making a Notarial Deed, the Notary Public also needs to explain the law of the Notarial Deed because the task called "*Esterioic*" means that special education and ability are needed, because it requires precision and accuracy. Besides that, a Notary Public as a public official must be sensible, and responsive, able to think critically and give accurate analysis on each legal and social phenomenon in order to encourage bravery in making the right action.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Notarial Deed, Legal Force